PERAN PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN DEFORESTASI DI WILAYAH HUTAN RONGKONG

Sintya¹, Hendi², Desrita Sari³, Nursyamsi Ichsan⁴
Universitas Mega Buana Palopo^{1,2,3,4}

Email: sintyabudiman506@gmail.com¹, hendikalotok021@gmail.com²,
desritasari21@gmail.com³, nursyamsiichsan@gmail.com⁴

Abstrak

Judul penelitian ini adalah Peran Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Pencegahan Deforestasi di Wilayah Hutan Rongkong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di wilayah hutan Rongkong, upaya-upaya apa yang dilakukan pihak KPH Rongkong dalam melaksanakan penyuluhan hukum untuk menanggulangi deforestasi hutan dan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hutan Rongkong terhadap pentingnya pelestarian hutan dan pencegahan deforestasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif empiris. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan di wilayah hutan rongkong, pihak KPH Rongkong rutin melaksanakan patroli di sekitar hutan lindung dan penyuluhan hukum secara langsung dan di hadiri oleh masyarakat sekitar hutan, toko Masyarakat, dan toko adat. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan, pemahaman masyarakat terkhususnya di desa Kalotok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat Deforestasi hutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebijakan Lingkungan, Dampak Deforestasi

Abstract

This research is titled “*The Role of Legal Counseling as an Instrument for Preventing Deforestation in the Rongkong Forest Region.*” The aim of this study is to identify the factors that influence the success or failure of legal counseling in preventing deforestation in the Rongkong forest area, to examine the efforts made by the Rongkong Forest Management Unit (KPH Rongkong) in carrying out legal counseling as a strategy to mitigate deforestation, and to assess the effectiveness of such counseling in raising community awareness regarding forest conservation and deforestation prevention. The method used in this research is normative-empirical. In order to enhance public awareness of forest conservation in the Rongkong forest area, KPH Rongkong regularly conducts patrols around the protected forest and holds direct legal counseling sessions attended by local communities, traditional leaders, and community figures. These efforts indicate that legal counseling has provided knowledge and understanding to the community, particularly in Kalotok Village, Baebunta Subdistrict, North Luwu Regency, in preventing forest area degradation caused by deforestation.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Policy, Deforestation Impact

A. Pendahuluan

Indonesia menempati peringkat ketiga (sesudah Brazil dan Zaire) dalam kekayaan hutan hujan tropis, dan memiliki 10% dari sisa sumber daya ini didunia. Perkiraan resmi mengenai kawasan lahan hutan di Indonesia sangat bervariasi. REVELITA VI, 1994/1995-1998/1999 menyebutkan bahwa ada 92,4 juta ha lahan hutan pada tahun 1993 (RI 1994:312). Ini merupakan 48,1% dari keseluruhan daratan Indonesia.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam yang dimiliki ini tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti pembalakan liar (illegal logging).

Pembalakan liar (illegal logging) merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai illegal logging merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata.

Illegal logging menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Masalah illegal logging mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor, hal ini berkaitan dengan doferestasi dan degradasi lingkungan yang terus berlangsung tanpa henti. Selain itu, pembalakan liar (illegal logging) mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti

yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Hutan Rongkong, Kecamatan Limbong, Kabupaten Luwu Utara. Dimana Lokasi hutan negara masih banyak terjadi deforestasi besar-besaran yang di lakukan Masyarakat, baik masyarakat di sekitar kawasan hutan maupun diluar wilayah hutan.

Hutan Rongkong yang terletak di wilayah yang memiliki kekayaan alam dan biodiversitas tinggi, merupakan salah satu kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Kawasan hutan ini mengalami deforestasi yang signifikan. Penyebab utama deforestasi ini adalah aktivitas illegal seperti penebangan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian, serta praktik pertambangan yang tidak terkendali. Dampak dari deforestasi tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem hutan itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam hutan tersebut.

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, upaya pencegahan melalui instrument hukum menjadi sangat penting. Walaupun telah ada berbagai kebijakan dan peraturan terkait perlindungan hutan, tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan masih rendah. Dalam hal ini adalah melalui penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di wilayah hutan rongkong, yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit X Rongkong berupa patroli sekaligus himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian hutan, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga, mencegah bencana alam, dan menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penyuluhan hukum di harapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, dan mengetahui konsekuensi hukum dari Tindakan yang merusak lingkungan. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Namun, efektivitas dari penyuluhan hukum tersebut masih perlu di kaji lebih lanjut, terutama dalam konteks wilayah hutan Rongkong.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada artikel ini adalah metode normatif empiris dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Dimana metode penelitian normatif yang bersumber dari buku dan jurnal, sedangkan metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat dan beberapa petugas polisi kehutanan. Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Baebunta yang berlokasi di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit X Rongkong (KPH Unit X Rongkong) dan Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki potensi hutan rakyat yang cukup besar. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini selama 1 minggu, di mulai pada tanggal 30 januari-7 februari 2025.

Populasi dan sasaran dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah tergabung didalam kelompok tani hutan rakyat, dan sejumlah polisi hutan yang bertugas di KPH Rongkong yang mengawasi dan mengelola hutan rakyat.

Penentuan sampel dilakukan dengan memasuki langsung daerah yang termasuk hutan rakyat yang terletak di desa Kalotok. Jenis data yang di peroleh merupakan data primer yang di peroleh dari narasumber yang dianggap relevan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan penelitian yaitu dari responden melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan (koesioner yang telah disusun) dan dari penyuluhan hukum di lapangan. Sesuai dengan tujuan penelitian analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif untuk menggambarkan pengelolaan hutan rakyat di kabupaten Kabupaten Luwu Utara dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity Threat) untuk merumuskan Strategi penyuluhan hukum untuk mencegah deforestasi hutan di wilayah hutan rongkong.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi dan menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, seperti penembangan pohon secara terus menerus yang dapat menyebabkan deforestasi hutan dan kerusakan ekosistem hutan. Seperti dalam amanat undang-undang nomor 41 tahun tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 46 Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan,kawasan hutan lingkungannya,agar fungsi lindung,fungsi konservasi,dan fungsi produksi,tercapai secara optimal dan lestari.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum sebagai instrumen pencegahan deforestasi di wilayah hutan rongkong

- Faktor peraturannya sendiri,dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalahnya terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya,contoh pada 47 UU No. 41 Ttg. Kehutanan disebutkan bahwa:
Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan,kawasan hutan,dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia,ternak,kebakaran,daya-daya alam,hama,serta penyakit;dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,Masyarakat,dan perorangan atas hutan,kawasan hutan,hasil hutan,investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelola hutan.Pada pasal 38 UU No. 41 Ttg. Kehutanan disebutkan bahwa :
 - (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
 - (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
 - (3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
 - (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.Terhadap dua pasal tersebut

diatas berkesan kontradiktif dimana pasal 47 mengamanatkan untuk dijaga dan dilindungi namun di pasal 38 dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan termasuk kegiatan membangun.

- Faktor masyarakat, faktor ini sangat mempengaruhi oleh karena terkadang masyarakat apatis, tidak mendukung, tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum, terlebih apabila suatu wilayah kawasan hutan itu sudah terdapat keterlanjutan pengelolaan oleh oknum masyarakat termasuk klaim terhadap suatu wilayah kawasan hutan negara dengan dalih hutan adat oleh masyarakat adat tertentu.

2. Upaya yang di lakukan pihak KPH Rongkong dalam melaksanakan penyuluhan hukum untuk mengurangi deforestasi hutan

Menyampaikan secara langsung ke masyarakat pada setiap kesempatan, baik pada saat pelaksanaan kegiatan patroli oleh polisi kehutanan maupun pada saat kegiatan penyuluhan pemberdayaan masyarakat oleh penyuluhan kehutanan serta pada kegiatan-kegiatan pertemuan forum yang dihadiri oleh KPH dan melalui media sosial.

Langkah lain yang petugas polisi kehutanan lakukan adalah rutin melakukan patrol disekitar hutan lingkungan, dan apabila ada masyarakat yang tertangkap tangan melakukan penebangan hutan dalam kawasan hutan lindung akan di tangkap dan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya demi Terwujudnya tujuan dari KPH Rongkong yaitu hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera, tentunya mereka memberikan ijin kepada Masyarakat untuk membuka kawasan hutan yang bukan termasuk kawasan hutan negara untuk kemudian dikelola sesuai dengan besarnya lahan yang diberikan, sehingga pelestarian flora dan fauna tetap terjaga dan Masyarakat juga diberikan bibit tanaman yang berupa bibit kopi, coklat dan alpukat .

3. Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Hutan Rongkong terhadap Pentingnya Pelestarian Hutan dan Pencegahan Deforestasi

KPH rongkong tidak memiliki staf yang secara khusus memegang tanggung jawab dalam jabatan penyuluhan hukum, namun secara organisasi tetap dilakukan evaluasi tersebut pada akhir tahun dengan melakukan pengolahan data Tingkat gangguan atau pelanggaran yang ditemukan termasuk jumlah laporan informasi kejadian ataupun pengaduan dari Masyarakat dimana hasilnya menunjukkan trend penurunan. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak KPH rongkong dalam patroli rutin yang dilakukan disekitar hutan lindung dan masyarakat sekitar hutan untuk tetap menjaga kelestarian hutan.

Dengan hasil yang menunjukkan tren penurunan terhadap tingkat gangguan atau pelanggaran yang ditemukan hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk respon dari apa yang telah disampaikan. Peran pemerintah daerah dan Lembaga terkait dalam mendukung penyuluhan hukum sangat mendukung karena setiap kegiatan rutin KPH rongkong baik itu patroli, penyuluhan maupun kegiatan lainnya selalu membuka ruang seluas-luasnya dan merespon segala bentuk dukungan yang kami butuhkan, sebagai contoh pemda luwu utara telah memfasilitasi terbentuknya satgas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penyuluhan hukum juga sangat

memberikan dampak yang baik kepada Masyarakat, karena dengan adanya kesadaran hukum, Masyarakat akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dalam menghindari perilaku yang melanggar hukum.

D. Penutup

Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyuluhan hukum di wilayah Hutan Rongkong meliputi ketidaksinkronan regulasi, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat, serta masih kuatnya klaim terhadap wilayah hutan sebagai tanah adat. Faktor-faktor ini menjadi tantangan dalam menanamkan kesadaran hukum secara menyeluruh di tingkat lokal.
2. Upaya KPH Rongkong dalam melaksanakan penyuluhan hukum dilakukan melalui patroli hutan yang dibarengi dengan sosialisasi langsung, pemanfaatan media sosial, pemberian izin kelola terbatas, serta distribusi bibit tanaman produktif. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi masyarakat serta kolaborasi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
3. Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terlihat dari hasil evaluasi internal dan pengamatan di lapangan, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan dan penurunan aktivitas pelanggaran kawasan hutan, khususnya di desa Kalotok.

Saran

Penyuluhan hukum perlu ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal yang melibatkan tokoh adat dan komunitas setempat sebagai agen perubahan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat harmonisasi regulasi dan dukungan kelembagaan agar penyuluhan hukum dapat berjalan konsisten, terukur, dan berdampak langsung pada perlindungan kawasan hutan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah, Kadaryanto, Bagio, Oktapani, Silm. (2020). *Penyuluhan Larangan Pembakaran Hutan di Kampung Pinang Sebatang Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan*. Jurnal Madaniya Vol. 1 No. 2
- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing restorative justice through mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243–248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Hakim, Lukman. dkk (2023). *Resiliensi Masyarakat dan Penyuluhan Pasca Banjir di Masamba Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Penyuluhan Vol. 19 (02) <https://doi.org/10.25015/19202346001>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Ropei, A. (2020). *The Resolution of Criminal Cases Through a Restorative Justice Approach in Islamic Law Perspective*.
- Saraswati, R. (2018). *Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana*. *Mimbar Hukum*, 30(2), 246–259. <https://doi.org/10.22146/jmh.32681>
- Wahid, A. (2020). *Keadilan restoratif dalam perspektif hukum pidana*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(2), 265–290. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3240>
- Purwanto, H., & Setiawan, B. (2021). *Strategi Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Kalimantan*.
- Simarmata, R. (2022). *Evaluasi Penegakan Hukum di Kawasan Hutan Lindung Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 17(2), 221–240.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan HAM dan Lingkungan Hidup di Kawasan Hutan Adat*. Jakarta: Komnas HAM RI.